

BAB II

FENOMENA *FEMICIDE* DI MEKSIKO

Kekerasan berbasis gender merupakan isu yang hingga saat ini masih sangat diperhatikan karena masih sering terjadi. Kekerasan berbasis gender merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan dapat mengancam jiwa seseorang. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan bagi perempuan baik secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk juga ancaman akan tindakan tersebut, dan pemaksaan dan perampasan kebebasan secara sewenang-wenang. Definisi tersebut muncul dari Konferensi Perempuan PBB pada tahun 1995 di Beijing. Kekerasan berbasis gender oleh laki-laki terhadap perempuan diakui secara global sebagai masalah kesehatan, pembangunan ekonomi, dan hak asasi manusia. Namun, banyak orang di berbagai belahan dunia masih menganggap isu kekerasan berbasis gender ini masih dianggap sebagai masalah pribadi (Russo & Pirlott, 2006).

Meksiko telah menghadapi krisis keamanan yang berkelanjutan selama beberapa dekade dan dalam beberapa tahun terakhir tingkat kekerasan di Meksiko mencapai rekor tertinggi. Badan Statistik dan Geografi Nasional Meksiko (INEGI) melaporkan terdapat sekitar 36.579 kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2020. Pada tahun tersebut juga, INEGI melaporkan terdapat 2.876 pembunuhan terhadap perempuan (McGinnis, Ferreira, & Shirk, 2022). Kekerasan berbasis gender sendiri meningkat di Meksiko, dimana banyak

kasus seperti pembunuhan terhadap perempuan, kekerasan seksual dan meningkatnya penculikan atau penghilangan orang. Selama sepuluh tahun terakhir, peningkatan atas jumlah pembunuhan dan kekerasan terhadap perempuan di Meksiko terus meningkat. Hal ini menempatkan Meksiko sebagai salah satu negara dengan tingkat kekerasan gender tertinggi di dunia. Hal ini sendiri tentunya mendapat sorotan nasional dan internasional. Salah satu hal yang menyebabkan tingginya tingkat kekerasan gender di Meksiko yaitu tingkat keamanan negara yang terbilang cukup rendah dimana terdapat banyak organisasi yang berkaitan dengan bisnis narkoba. Selain itu, budaya patriarki yang sangat mengakar di negara ini juga menjadi penyebab utama tingginya tingkat kekerasan gender khususnya terhadap perempuan (Santamaria & Zulver, 2023).

2.1 *Femicide* di Meksiko

2.1.1 Awal Mula Munculnya *Femicide* di Meksiko

Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang sering terulang dan terjadi hampir di seluruh dunia. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi yang dapat berdampak terhadap berbagai pihak khususnya perempuan, dimana hingga saat ini masih banyaknya perempuan yang merasa belum mendapat hak-haknya, kebebasan, kehidupan yang nyaman, dan tidak merasa gelisah dalam menjalani kehidupan sehari-hari (UN Women, 2020). Selain hak-hak yang direnggut kekerasan terhadap wanita ini juga tentunya dapat menyebabkan masalah lainnya seperti

masalah fisik, mental, seksual, kesehatan reproduksi, dan terenggutnya nyawa (WHO, 2021).

Femicide merupakan bentuk pelanggaran terhadap beberapa hak asasi manusia yang sangat mendasar yaitu hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan diri. Selain itu, dengan adanya isu *Femicide* ini dapat menjadi hambatan bagi pembangunan sosial dan ekonomi di dalam suatu negara. *Femicide* sendiri sering dijadikan tindakan terakhir oleh seseorang dalam suatu hubungan yang kasar dan hal tersebut termasuk ke dalam kategori *Violence Against Women and Girls* (VAWG) (Corradi, 2021).

Istilah *femicide* sendiri muncul didasari dari tindakan pembunuhan terhadap perempuan berbasis gender oleh laki-laki. Istilah ini sendiri sudah ada sejak lama yaitu di Inggris pada abad ke-19. Penggagas dari konsep *femicide* ini yaitu seorang feminis dari Amerika yaitu *Diana H. Russell*, dimana pada tahun 1976 di *International Tribunal on Crimes against Women* yang pertama kali diadakan Diana menyatakan bahwa istilah *femicide* itu merujuk pada pembunuhan perempuan oleh laki-laki semata-mata karena mereka perempuan (Grzyb, Naudi, & Marcuello, 2018). Russel sendiri berpendapat bahwa penyebab dari terjadinya *femicide* yaitu rasa benci atau tidak suka terhadap perempuan atau dapat disebut juga sebagai misogini (Pasinato & Avila, 2023).

Pada tahun 1979, PBB membuat *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan mulai berlaku pada tahun 1981. Semua negara di Amerika Latin telah meratifikasi CEDAW ini pada tahun 2001, termasuk juga Meksiko salah satunya. CEDAW menciptakan

serangkaian reformasi domestik di Amerika Latin untuk mengatasi femisida, dan mengklasifikasikan femisida sebagai tindakan kriminal yang berbeda dari bentuk pembunuhan lainnya. Berbagai upaya dari undang-undang internasional dan domestik yang dikhususkan untuk menjamin hak perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan dan juga berbagai kampanye telah dilakukan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, namun tingkat femisida di Amerika Latin tetap menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Kasus femisida di Meksiko sendiri mendapat perhatian khusus dikarenakan adanya budaya *Machismo* yang melekat dalam masyarakat negara ini sehingga memperburuk kekerasan terhadap perempuan dan femisida (Hernandez, 2023).

Meksiko sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang dan mengesankan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an, terjadi pembunuhan terhadap anak perempuan dan perempuan di salah satu kota yang terletak di perbatasan Sungai Rio Grande yaitu kota Ciudad Juarez (Minutaglio, 2020). Pembunuhan tersebut memakan sekitar 400 korban yang terdiri atas anak perempuan dan perempuan, banyak dari korban tersebut yang dilaporkan hilang dan ditemukan dalam keadaan tewas (Sandin, 2020). Kasus *femicide* di Juarez ini bermula pada tahun 1993, dimana pada masa itu banyak perempuan di Juarez diculik, disiksa, dilecehkan, dan dibunuh. Tingginya kasus *femicide* di Juarez ini dikarenakan lokasi Juarez yang terletak di perbatasan antara Meksiko dan AS, dimana banyak berdiri pabrik-pabrik yang dimiliki oleh negara asing beroperasi disana. Tingginya *femicide* di kota tersebut dikarenakan banyak

wanita yang menjadi korban eksploitasi pekerja dan dilecehkan di pabrik (Meno, 2017).

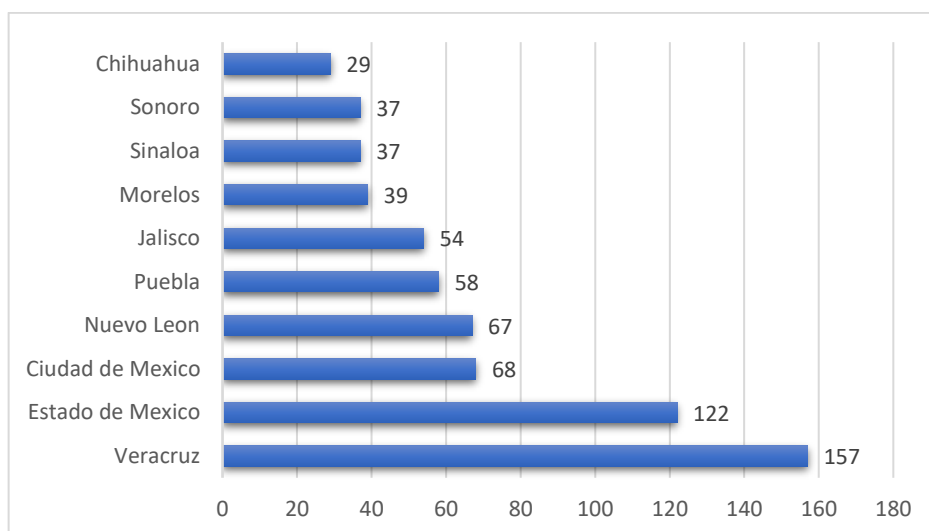
Tingginya tingkat kekerasan gender di Meksiko bermula saat masa penjajahan bangsa Eropa seperti Spanyol ke benua Amerika. Banyak dari para penjajah yang melakukan pelecehan hingga pemerkosaan terhadap wanita pribumi. Hal tersebut menciptakan istilah “*mestizo*” atau orang-orang keturunan Spanyol dan pribumi. Namun banyak dari orang-orang keturunan ini membenci ibunya yang merupakan pribumi berdarah indian. Jadi, dapat dipastikan bahwa meningkatnya kekerasan gender di Meksiko ini diakibatkan penjajahan oleh bangsa Eropa. Selain itu, sebagian besar hukum awal Meksiko terinspirasi atau mengacu pada hukum perdata dari Prancis. Dimana perempuan pada masa itu dicantumkan sebagai tanggungan dari laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan, dari mulai hukum hingga keuangan. Sehingga, perempuan pun pada akhirnya dianggap lemah dan lebih rendah kedudukannya dari laki-laki. Dari hal tersebut, mulai muncul budaya patriarki atau yang dikenal juga sebagai *machismo* (Morena, 2020). Munculnya budaya *machismo* ini tentunya berdampak pada pola perilaku masyarakat di Meksiko, dimana kekerasan terhadap perempuan menjadi hal yang diwajibkan dan sering dilakukan di lingkup masyarakat.

2.1.2 Peningkatan Kasus *Femicide* di Meksiko dari Tahun ke Tahun

Seiring berjalannya waktu, isu kekerasan gender khususnya *femicide* di Meksiko ini tidak kunjung dapat dituntaskan oleh pemerintah. Jumlah korban *femicide* di Meksiko dari tahun ke tahun meningkat. Untuk mengetahui

dan menghitung data dari jumlah korban *femicide* sendiri sulit ditemukan. Hal ini dikarenakan tidak semua negara yang secara rutin untuk mengumpulkan data dan mengirimkannya ke database internasional *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Berdasarkan data resmi dari pemerintahan Meksiko, kasus *femicide* dari tahun 2015 hingga tahun 2020 terus meningkat. Isu *femicide* di Meksiko ini dapat dikatakan isu berkelanjutan yang sulit ditangani. Menurut data dari *Instituto Nacional de Estadística y Geografía* (INEGI) dari tahun 1990 hingga 2015, rata-rata setiap tahunnya terdapat 1.681 korban pembunuhan perempuan di Meksiko. Namun angka ini mulai meningkat dua kali lipat dari tahun 2016-2020 yaitu menjadi sekitar 3.568 korban pembunuhan perempuan setiap tahunnya (McGinnis, Ferreira, & Shirk, 2022).

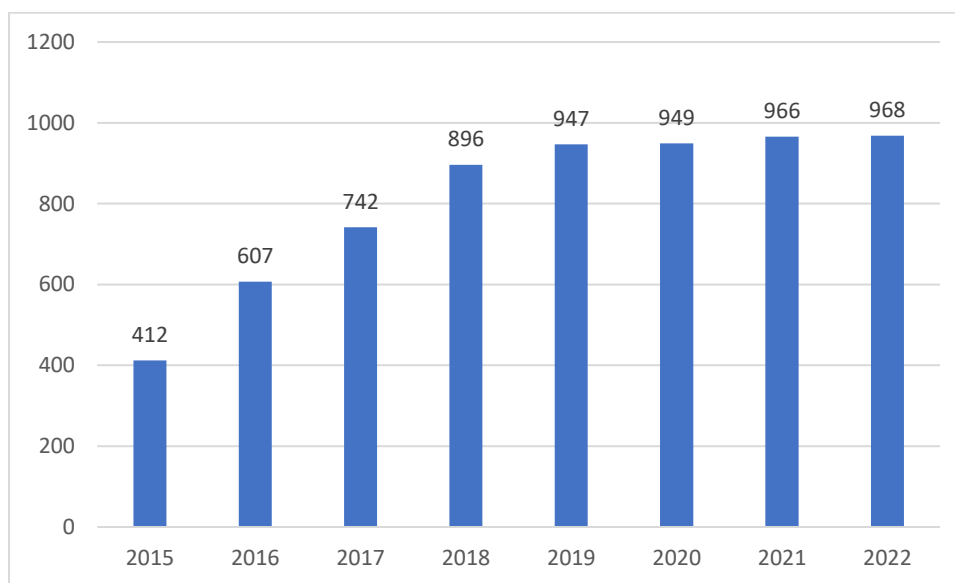
Gambar 2. 1
Chart 10 Kota di Meksiko dengan Kasus Femisida Tertinggi (2015-2019)



Sumber: *Secretary of Citizen's Security and Protection of Mexico, and the Executive Secretariat of the National System of Public Security of Mexico.*

Menurut data statistik dari *Secretary of Citizen's Security and Protection of Mexico, and the Executive Secretariat of the National System of Public Security of Mexico*, jumlah kasus *femicide* di Meksiko dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari data tersebut bahwa kasus *femicide* di Meksiko mengalami peningkatan sekitar lebih kurang 100 kasus *femicide* tiap tahunnya. Selain itu, data tersebut juga turut serta menampilkan 10 kota di Meksiko dengan kasus *femicide* terbanyak.

Gambar 2. 2
Jumlah Kasus Femisida di Meksiko (2015-2022)



Sumber: Statista

Data diatas merupakan data yang diperoleh dari Statista yaitu jumlah korban *femicide* di Meksiko dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kasus *femicide* di Meksiko sendiri mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019, namun pada tahun-tahun selanjutnya dapat kita lihat bahwa jumlah kasus *femicide* di Meksiko tidak

mengalami peningkatan yang terlalu signifikan, namun jumlahnya tetap bertambah setiap tahunnya.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat *femicide* di Meksiko sendiri cukup tinggi. Selain itu, kondisi tersebut diperkeruh dengan adanya penyebaran virus COVID-19 pada tahun 2020. Masa COVID-19 merupakan masa yang sangat sulit bagi seluruh masyarakat dimanapun, banyak masyarakat yang sangat berputus asa dan melakukan segala hal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak jarang mereka melakukan tindakan kekerasan hingga pembunuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada masa ini, tingkat pembunuhan terhadap wanita di Meksiko juga meningkat.

Salah satu kasus *femicide* yang cukup menggemparkan masyarakat Meksiko yaitu terjadi pada tahun 2020, dimana di awal tahun 2020 terjadi pembunuhan terhadap seorang perempuan bernama *Ingrid Escmailla* berusia dua puluh lima tahun. Setelah kejadian tersebut banyak Masyarakat yang melakukan unjuk rasa ke istana presiden dengan menuntut tindakan pemerintah, dan mengecam para media yang menyebarkan atau menerbitkan foto dari tubuh korban secara online. Pada 8 Maret 2020, para aktivis di Meksiko menyerukan demonstrasi nasional yang bertepatan dengan Hari Perempuan Nasional. Unjuk rasa ini juga merupakan serangkaian kampanye untuk melawan kekerasan berbasis gender yang terus menerus terjadi di Meksiko (Cheatham, 2020).

2.2 Faktor Pendorong Tingginya Kasus Femicide di Meksiko

Terdapat beberapa faktor yang memicu kasus *femicide* di Meksiko terjadi dan meningkat seiring waktu berjalan. Secara umum, faktor budaya dan kehidupan bermasyarakat di negara ini menjadi faktor penentu bagaimana *femicide* bisa terjadi.

1. Machismo

Isu *femicide* yang terjadi di Meksiko ini tentunya didorong oleh berbagai faktor yang dapat menyebabkan isu terus menerus membesar dan sulit ditangani. Salah satu faktor pendorong yang dapat dikatakan sebagai faktor utama dibalik isu *femicide* di Meksiko yaitu budaya, dimana budaya sendiri tentunya sudah melekat sejak lama dalam kehidupan sosial masyarakat di negara tersebut. Budaya *machismo* yang mengakar di Meksiko sejak lama ini menjadi salah satu penyebab *femicide* banyak terjadi. Istilah *machismo* sendiri di era populer ini menjadi penanda bahwa laki-laki itu lebih superior dibandingkan perempuan atau adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam berbagai hal, seperti dalam bentuk pikiran, tindakan, dan keputusan. (Hurtado & Sinha, 2016).

Istilah *machismo* sendiri menggambarkan maskulinitas, dimana istilah ini memiliki konotasi yang negatif dan sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana laki-laki itu lebih dominan dan superior. Hal ini sendiri dapat terbentuk dari lingkungan sosial seperti didikan orang tua. Istilah *machismo* sendiri berasal dari Bahasa Spanyol yang biasanya digunakan untuk menggambarkan sikap dominasi dan keunggulan pria yang disahkan melalui

sistem sosial patriarki dan diperkuat melalui nilai dan norma budaya. Adanya *machismo* ini semakin memperkuat gagasan bahwa perempuan hanyalah warga negara kelas dua seperti dalam hal hak, kesempatan, keterlibatan dalam kebijakan publik. Selain itu perempuan juga sering dijadikan objek yang selalu diremehkan seperti di lingkungan rumah tangga, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di jalanan. Untuk itu, banyak perempuan yang merasa hak mereka dibatasi dan kebebasan dan keamanan mereka terancam (Ortiz, 2018).

Budaya *machismo* ini meyakini bahwa perempuan itu harus tunduk pada kebutuhan dan keinginan pasangan laki-laki mereka, merawat mereka, dan memberikan kesenangan pada mereka (Wilson, 2014). Budaya yang ada di masyarakat latin sendiri dipengaruhi oleh hukum Romawi, yang mana dengan tegas menekankan laki-laki sebagai penguasa (Segrest, 2003).

Budaya *machismo* ini diyakini muncul akibat meningkatnya seksisme pada zaman penjajahan bangsa Eropa ke Amerika Latin. Dimana pada masa itu banyak wanita pribumi yang diperkosa oleh para penjajah yang datang ke Meksiko. Pada zaman ini hukum yang mengatur negara Meksiko sendiri mengklasifikasikan perempuan merupakan tanggungan dari laki-laki di segala aspek dari hukum hingga finansial. Para pemikir Eropa pada masa itu juga berpendapat bahwa perempuan lebih cocok untuk lingkungan rumah tangga dibandingkan dengan laki-laki yang dilahirkan sebagai pemikir dan dapat bertindak sebagai agen independen. Budaya *machismo* ini memiliki kesamaan dengan *toxic masculinity*, yang mana mempercayai dan mendukung pernyataan bahwa laki-laki lebih dominan dan superior dibanding perempuan. Laki-laki

dalam hal ini mengambil peran dominan di masyarakat yang mana mereka memegang kontrol lebih terhadap perempuan (Morena, 2020). Menurut seorang asisten professor Studi Amerika Latin di *Bucknell University*, Pamela Neumann menjelaskan bahwa adanya muncul ekspektasi sosial dan budaya di Amerika Latin sejak penjajahan oleh Spanyol, dimana laki-laki mengekspresikan maskulinitas mereka dengan mengklaim bahwa mereka berhak atas perempuan. Kejahatan terhadap perempuan juga dilihat sebagai hal yang tidak penting dikarenakan keberadaan perempuan tidak terlalu begitu penting di dalam masyarakat (Eagan, 2020). Dapat dilihat bahwa dengan adanya budaya atau nilai-nilai *machismo* yang sangat kental dan terus di pertahankan di Meksiko, membuat kekerasan gender menjadi kasus kekerasan yang dipandang wajar oleh banyak orang.

2. Perdagangan Narkoba

Selain budaya *machismo* yang masih sangat kental di Meksiko, salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya *femicide* juga dikarenakan Meksiko merupakan jalur penting bagi penyalur atau perdagangan narkoba di kawasan Amerika. Lebih dari satu dekade otoritas atau pihak berwenang di Meksiko telah meluncurkan perang melawan kartel-kartel narkoba, namun hal ini sangat sulit diatasi. Perang melawan narkoba ini dimulai oleh Pemerintah Meksiko sejak tahun 2006. Pada masa itu, Meksiko dipimpin oleh Presiden Felipe Calderon. Selama menjabat menjadi presiden, Calderon mengesahkan undang-undang untuk mereformasi sistem peradilan di Meksiko, dan dia juga mengupayakan beberapa hal seperti memperkuat sektor energi, meningkatkan

jumlah lapangan kerja, dan memerangi kejahatan dan kartel narkoba. Operasi untuk memerangi narkoba oleh Calderon ini dimulai pada Desember 2006, yaitu dengan meluncurkan operasi keamanan yang melibatkan puluhan ribu anggota militer. Melalui operasi ini, tingkat kekerasan meningkat dan jumlah orang yang terbunuh juga meningkat. Meningkatnya tingkat kekerasan di Meksiko sejak operasi tersebut dijalankan, membuat hal ini menjadi krisis keamanan nasional yang secara luas ditandai sebagai *Mexico's Drug War* (Parkes, 2024).

Perjuangan memerangi narkoba oleh Meksiko ini dibantu oleh Amerika Serikat dengan memberikan dana bantuan kepada Meksiko untuk memodernisasi pasukan keamanannya, mereformasi sistem peradilan, dan membuat proyek-proyek pembangunan dengan tujuan untuk memberikan pertahanan di wilayah perbatasan selatan Meksiko. Setelah melancarkan kebijakan memerangi narkoba ini, banyak pembunuhan, penculikan terjadi setiap harinya. Data dari *National Search Commision* mengungkapkan bahwa lebih 90.000 orang telah menghilang sejak dilancarkannya kebijakan *war on drugs* di tahun 2006. Kurangnya catatan atau data yang transparan mempersulit penemuan jumlah korban yang pasti dari tragedi tersebut (CFR, 2022).

Dampak dari perang melawan narkoba ini pada akhirnya membuat kekerasan meningkat, pelanggaran hak asasi manusia, penyiksaan, pembunuhan, dan penghilangan paksa. Tingkat femisida pada masa ini juga meningkat, dimana jumlah pembunuhan terhadap wanita meningkat dua kali

lipat dalam tiga tahun setelah Presiden Caldero meluncurkan kebijakan ini dan melancarkan berbagai serangan terhadap kelompok-kelompok kriminal. Sebagian besar migran perempuan Meksiko yang pindah ke AS merasakan keresahan dan memilih pergi untuk menghindari kekerasan dan ketidakamanan di negara yang mereka tinggali sebelumnya. Maraknya kelompok kriminal dan kartel di Meksiko membuat banyak perempuan di sepanjang perbatasan Meksiko dan AS tidak aman dan banyaknya kecaman dan juga adanya paksaan terhadap perempuan untuk masuk ke industri seks. Hal inilah yang membuat tingkat *femicide* meningkat, dimana banyak perempuan yang hilang dan diculik untuk diperdagangkan oleh organisasi kriminal (Cawley, 2013).

3. Maquiladoras

Kekerasan gender khususnya *femicide* sudah terjadi Meksiko sejak lama. Kekerasan gender bisa terjadi dimana saja, salah satunya di tempat kerja. Maquiladora merupakan pabrik-pabrik berbiaya rendah yang beroperasi di Meksiko namun dimiliki oleh entitas asing, dan nantinya produk yang diproduksi di ekspor kembali ke negara pemilik pabrik. Maquiladora ini sendiri pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an dengan tujuan untuk mengatasi pengangguran dan mendorong investasi asing (Kenton, 2022).

Maquiladora ini biasanya beroperasi di wilayah perbatasan Meksiko dan AS seperti di wilayah Juarez. Salah satu efek positif dari maquiladora ini tentunya menciptakan lapangan pekerja baru bagi banyak orang termasuk wanita di Meksiko. Namun, maquiladora sendiri banyak dikecam oleh banyak kalangan karena diketahui adanya eksploitasi pekerja. Dimana kondisi kerja

yang di bawah standar dengan upah harian yang sangat sedikit dan jam operasi yang tidak wajar dimana hampir 24 jam aktif. Selain itu, banyak pekerja perempuan di pabrik mengalami kekerasan seksual dan fisik. Terdapat beberapa kejadian pekerja perempuan dilecehkan oleh atasannya dan banyak juga kejadian pelecehan dan penculikan di jalan ataupun di transportasi umum saat mereka pulang dari pabrik tempat mereka bekerja (Meno, 2017).

2.3 Penanganan *Femicide* oleh Pemerintah Meksiko

Femicide menjadi salah satu kasus kekerasan gender yang sering terjadi di Meksiko. Aktivis HAM di Meksiko telah lama mendesak pemerintah untuk mengatasi pembunuhan terhadap perempuan ini. Pemerintah Meksiko memiliki kewajiban tidak hanya untuk meningkatkan penyelidikan terhadap kejahatan yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan, namun pemerintah harus lebih proaktif untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan terus terjadi (Vivanco, 2020). Awal tahun 2000-an, pemerintahan Meksiko telah membentuk komisi untuk menangani isu *femicide*. Hasil kerja dari komisi ini yaitu Undang-Undang tentang Akses Perempuan ke Kehidupan yang Bebas dari Kekerasan (*General Law for Women's Acces to a Life Free of Violence*) pada tahun 2007 dan pada tahun 2010 menambahkan *femicide* ke dalam hukum pidana federal.

Sejak 2012, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Federal Meksiko mendefinisikan femisida sebagai salah satu jenis pembunuhan yang mana korbannya merupakan perempuan dengan alasan hanya karena jenis kelaminnya. Adanya definisi hukum ini untuk mempermudah klasifikasi

pembunuhan dalam keadaan tertentu dapat dikategorikan sebagai femisida. Menurut Undang-Undang tersebut terdapat tujuh keadaan yang dapat diklasifikasikan sebagai femisida (Sandin, 2020), yaitu:

1. Adanya tanda-tanda kekerasan seksual.
2. Korban menderita luka serius atau dimutilasi.
3. Terdapat catatan bukti tindakan kekerasan di lingkungan keluarga, kerja, dan sekolah yang melibatkan korban dan pelaku.
4. Korban dan pelaku memiliki suatu hubungan baik melibatkan emosional atau fisik.
5. Terdapat indikasi bahwa pelaku sebelumnya pernah mengancam akan membunuh, melecehkan, atau melakukan kekerasan fisik terhadap korban.
6. Korban pernah dibatasi untuk mengakses komunikasi sebelum pembunuhan.
7. Jasad dari korban diekspos di depan umum.

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Meksiko untuk menangani isu femisida. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan pelaporan dan pengumpulan data dari kasus femisida. Banyak dari kasus femisida di Meksiko yang tidak dilaporkan secara resmi kepada pemerintah, maka dari itu pemerintah sulit untuk mengumpulkan data pasti mengenai jumlah korban dan kasus femisida yang terjadi di Meksiko. Namun, sejak tahun 2012 pemerintah Meksiko secara resmi mulai menghitung data dari kasus pembunuhan perempuan.

Pemerintah Meksiko banyak dikritik oleh berbagai pihak dalam menangani isu *femicide* di dalam negara. Aktivis HAM di Meksiko telah mendesak pemerintah Meksiko sejak lama untuk menangani isu femisida ini. Mereka menggugat pemerintah Meksiko agar segera mengambil meningkatkan tindakan penyelidikan atas kejahatan yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan, dan menuntut agar mengambil langkah tegas dan proaktif untuk mencegah kekerasan terjadi. Mereka juga mendorong untuk Undang-Undang tentang Akses Perempuan terhadap Kehidupan Bebas Kekerasan tahun 2007 agar segera disahkan (Vivanco, 2020).

Pemerintah Meksiko sendiri sadar akan betapa parahnya isu ini, hal ini terlihat dengan adanya usaha dari pemerintah Meksiko yaitu dengan mengeluarkan undang-undang terkait dengan kehidupan perempuan yang bebas dari kekerasan. Hanya terdapat sedikit kemajuan dari usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Meksiko dan banyak kritik yang muncul terhadap kinerja pemerintah Meksiko dalam menangani isu *femicide*. Masyarakat menganggap pemerintah Meksiko terlalu menyepelekan isu *femicide* ini. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintahan Meksiko yaitu dengan mendirikan kantor kejaksaan yang dikhususkan untuk masalah kejahatan gender. Pemerintahan federal mengeluarkan peringatan yang berisikan kewajiban otoritas lokal, negara bagian, dan federal untuk mengambil tindakan langsung terhadap kasus *femicide* dan mengatasi bias dalam akses terhadap keadilan (Sanchez, 2022).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Meksiko dalam menangani isu *femicide* yaitu menciptakan *Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres* (AVGM) yang merupakan suatu program perlindungan HAM perempuan yang ditetapkan di dalam Undang – Undang tentang akses perempuan terhadap kehidupan bebas kekerasan. Program tersebut dibuat dengan tujuan utama untuk menjamin keselamatan dari perempuan dan anak perempuan, penghentian kekerasan terhadap perempuan dan menghapus kesenjangan (Gobierno De Mexico, 2021). Namun, program ini sendiri tidak terlalu efektif, dimana implementasinya masih tergolong kurang merata terlebih di negara bagian dan tidak ada perubahan yang cukup signifikan setelah penerapan program AVGM tersebut.

Penanganan *femicide* oleh pemerintah Meksiko dinilai masih kurang melihat masih adanya korban *femicide* hingga saat ini. Menurut salah satu jurnalis Meksiko, *Gloria Pina* di dalam film dokumenter produksinya yang berjudul “*The Survivors: Forgotten by Justice*”, menyatakan bahwa masih adanya kelalaian dan celah hukum dalam penindakan kasus *femicide* di Meksiko. Sebagian besar pelaku dari kasus *femicide* yang terjadi tidak ditindak lanjuti, hal ini sendiri dikarenakan masih kurangnya perspektif gender di dalam sistem hukum. Menurut dokumenter tersebut, selama delapan tahun terakhir jaksa penuntut Meksiko membuka penyelidikan kriminal terhadap sekitar 1,7 juta kasus terkait pemukulan, luka bakar, luka sayatan pisau, dan luka akibat senjata api terhadap perempuan. Namun, dari banyaknya jumlah kasus tersebut hanya 781 kasus yang dikategorikan sebagai kasus *femicide* dan sisanya hanya

dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang mana kategori ini memiliki sanksi yang lebih rendah dibanding dengan kasus *femicide*. Hal ini tentunya membuat korban hidup dalam ketakutan sebab pelaku tidak ditindak lanjuti karena lemahnya sistem hukum di negara tersebut (United Nations, 2023).

Walaupun pemerintah Meksiko telah mengupayakan beberapa cara untuk menangani isu *femicide*, masih belum ada upaya yang sangat efektif untuk memberantas femisida di negara tersebut. Hal ini tentunya dikarenakan terdapat beberapa faktor yang dihadapi pemerintah Meksiko, yaitu seperti tingginya tingkat impunitas. Tingginya tingkat impunitas di Meksiko membuat banyak kejahatan di Meksiko tidak tercatat secara resmi, dimana sekitar 93 persen kejahatan tidak dilaporkan atau tidak diselediki pada tahun 2018 (Sandin, 2020). Setelah itu hambatan budaya menjadi salah satu faktor pemerintah sulit untuk menangani isu femisida di Meksiko. Budaya machismo yang sangat mengakar di Meksiko berkontribusi terhadap tingginya tingkat femisida di negara ini, dimana banyak pihak yang menormalisasikan kekerasan terhadap perempuan. Untuk itu, penegakan hukum terhambat dan tidak efektif. Selain itu, sistem dukungan tidak memadai juga menjadi faktor penghambat pemerintah sulit menangani isu femisida. Sering kali sistem peradilan di Meksiko gagal untuk memberikan perlindungan ataupun dukungan yang memadai terhadap korban, oleh karena itu banyak korban yang kurang percaya terhadap penegakan hukum dan proses peradilan.

2.4 Perkembangan *Feminist Foreign Policy* dan Negara yang Turut

Mengadopsi

2.3.1 Awal Perkembangan FFP

Isu mengenai gender saat ini mulai perlahan diperhatikan oleh banyak negara. Berbagai cara diupayakan negara untuk menyuarakan kepedulian dan perhatian terhadap isu ini. Salah satu upaya yang bertujuan menyuarakan kepedulian terhadap isu gender yaitu dengan adanya *Feminist Foreign Policy*. Kebijakan Luar Negeri Feminis pertama kali diadopsi oleh Swedia pada tahun 2014. *Feminist Foreign Policy* saat ini menjadi sebuah tren yang berkembang, dimana banyak negara-negara lain yang tertarik dan turut mengikuti jejak Swedia untuk mengadopsi kebijakan ini. Praktik *Feminist Foreign Policy* pertama kali mendapat perhatian internasional pada Oktober 2014, yaitu ketika Menteri Luar Negeri Swedia *Margot Wallstrom* mengumumkan suatu kebijakan baru yaitu *feministik utrikespolitik* (FUP). Swedia sendiri sebagai negara pertama yang mengadopsi FFP ini memang telah lama memprioritaskan kesetaraan gender dalam kebijakan luar negerinya. Sejak itu pun, banyak negara dan partai politik yang mengikuti dan mengumumkan ketertarikan mereka terhadap *Feminist Foreign Policy* ini (Oas, 2020).

Feminist Foreign Policy ini merupakan suatu kebijakan yang mengarahkan negara untuk mempromosikan nilai-nilai untuk meraih kesetaraan gender dan untuk menjamin wanita mendapat hak asasi manusia mereka secara adil. Menurut *International Center for Research on Women*

(ICRW), mendefinisikan kebijakan luar negeri feminis sebagai kebijakan suatu negara yang saling berinteraksi dengan negara lain, serta gerakan dan aktor non-negara lainnya yaitu dengan cara mengutamakan perdamaian, kesetaraan gender dan integritas lingkungan. Menurut Thompson, *Feminist Foreign Policy* merupakan kebijakan suatu negara yang mendefinisikan interaksinya dengan negara lain, dan aktor-aktor lainnya dengan cara yang mengutamakan perdamaian, kesetaraan gender, integritas lingkungan hidup, dan melindungi HAM semua orang. Kebijakan ini berupaya untuk melumpuhkan struktur kekuasaan kolonial, rasisme, dan patriarki (Thompson, Ahmed , Silvia, & Montilla, 2023).

Dapat dikatakan bahwa *Feminist Foreign Policy* saat ini menjadi sebuah tren internasional bagi negara-negara, dimana dengan mulai banyaknya negara yang ikut serta mengadopsi kebijakan luar negeri ini. Tren ini sendiri telah menarik minat yang cukup besar sebagai suatu pendekatan alternatif untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Menurut *UN Women*, dengan adanya gerakan ini dapat mengubah praktik kebijakan luar negeri demi keuntungan yang lebih besar bagi perempuan dan juga anak perempuan dimana pun, memengaruhi diplomasi negara, kerja sama pertahanan dan keamanan, bantuan, perdagangan, keamanan iklim, dan kebijakan imigrasi (Thompson, Ahmed , Silvia, & Montilla, 2023).

Feminist Foreign Policy sendiri juga berkaitan dengan agenda dari *United Nations* yaitu *Women, Peace and Security*, dimana dalam agenda ini bertujuan untuk melindungi hak dan kebutuhan perempuan dalam situasi

konflik maupun pasca konflik. Agenda PBB mengenai hal ini sudah lama dilakukan, dapat dilihat melalui adanya beberapa konferensi dunia yang membahas mengenai perempuan (*United Nations World Conference on Women*). Konferensi ini pertama kali dilaksanakan di *Mexico City* pada tahun 1975, Kopenhagen pada tahun 1980, Nairobi pada tahun 1985 dan Beijing pada tahun 1995 (UN Women, 2020).

Konferensi dunia pertama yang membahas mengenai status wanita pertama kali diselenggarakan di *Mexico City*, penyelenggaraan konferensi ini juga bertepatan dengan *International Women's Year* pada tahun 1975. Adanya konferensi ini untuk mengingatkan masyarakat internasional bahwa diskriminasi yang dilakukan terhadap perempuan akan menjadi suatu masalah yang terus menerus terjadi di sebagian besar wilayah di dunia. *World Conference on Women* ini merupakan acara puncak dari peringatan hari perempuan internasional, dimana dengan melaksanakan konferensi ini isu mengenai kesetaraan gender dapat lebih dilirik lagi dan dipromosikan lebih. Konferensi ini sendiri pertama kali akan dilaksanakan di Kolombia, namun Kolombia pun pada akhirnya mundur karena tidak dapat menghasilkan dana yang diperlukan untuk menggelar suatu konferensi. Pemerintahan Meksiko pun akhirnya turun tangan, dan melihat konferensi ini sebagai peluang besar bagi negara untuk meningkatkan kedudukannya di komunitas internasional. Pada Konferensi di Meksiko ini, Majelis Umum PBB menyepakati tiga tujuan utama dari konferensi ini yaitu:

1. Kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi gender;

2. Integrasi dan partisipasi penuh perempuan dalam pembangunan;
3. Meningkatkan kontribusi perempuan terhadap penguatan perdamaian dunia.

Melalui konferensi ini, munculnya suatu desakan terhadap pemerinthan untuk merumuskan strategi nasioan, target dan prioritas. Hal ini mengarah terhadap pembentukan *International Research and Training Institute for the Advancement of Women* (INSTRAW) dan *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM), kedua organisasi ini pada akhirnya berunifikasi bersama dengan dua entitas PBB lainnya pada tahun 2010 untuk membentuk UN Women (United Nations, 1975).

World Conference on Women yang kedua dilaksanakan lima tahun setelah koneferensi pertama dilaksanakan yaitu pada 14-30 Juli 1980 di Kopenhagen, Denmark. Konferensi ini mengidentifikasi tiga bidang yang membutuhkan langkah-langkah untuk kesetaraan, pembangunan dan perdamaian, yaitu pertama akses yang sama terhadap pendidikan, kedua akses yang sama terhadap kesempatan mendapatkan pekerjaan, ketiga yaitu akses yang sama terhadap layanan perawatan kesehatan yang memadai. Laporan akhir dari konferensi tersebut menyatakan bahwa peninjauan dan penilaian kemajuan yang dicapai selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa integrasi perempuan ke dalam pembangunan telah diterima secara resmi oleh sebagian pemerinta sebagai tujuan perencanaan yang diinginkan. Banyak negara yang telah melakukan upaya untuk mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan (United Nations, 1980).

World Conference on Women ketiga dilaksanakan tepat setelah konferensi yang kedua dilaksanakan yaitu tepatnya pada 15-26 Juli 1985 di Nairobi, Kenya. Tujuan dari konferensi ini yaitu untuk menilai pencapaian PBB selama satu decade untuk perempuan (1976-1985). *World Conference on Women* di Nairobi ini menandai akhir dari kinerja PBB selama satu dekade untuk perempuan. Konferensi ini diakhiri dengan penerbitan sebuah dokumen yaitu “*Nairobi Forward Looking Strategies for the Advancement of Women*” yang berisi strategi untuk meningkatkan status perempuan dan mengintegrasikannya ke seluruh aspek pembangunan. Konferensi ini dihadiri lebih dari 140 perwakilan berbagai negara. Konferensi di Nairobi ini diberi mandat untuk mencari cara-cara baru dalam mengatasi hambatan untuk mencapai tujuan yaitu kesetaraan, pembangunan dan perdamaian. Konferensi Nairobi ini melihat bahwa isu kesetaraan gender bukanlah isu yang terisolasi, namun hal ini hampir terjadi di seluruh sektor kehidupan masyarakat, untuk itulah isu ini perlu diperhatikan lebih (United Nations, 1985).

World Conference on Women selanjutnya diadakan pada tanggal empat sampai lima belas September di Beijing, Cina. Konferensi kali ini dapat dibilang sebagai konferensi yang paling penting dari empat konferensi yang telah diadakan dalam rentang waktu 20 tahun dari 1975-1995, hal ini karena konferensi ini dibangun di atas kesepakatan politik yang telah dicapai pada tiga *World Conference on Women* sebelumnya. Lebih dari 17.000 partisipan yang menghadiri konferensi ini termasuk delegasi pemerintah, perwakilan NGO, dan media. Konferensi ini menandai titik balik dari agenda global untuk

kesetaraan gender. Melalui penyelenggaraan konferensi ini, menghasilkan suatu laporan yang disebut sebagai “*The Beijing Declaration and Platform for Action*”, yang mana hal ini diadopsi oleh 189 negara. Isi dari laporan tersebut berupa agenda pemberdayaan perempuan yang sekarang dianggap sebagai dokumen kebijakan global utama tentang kesetaraan gender.

Keempat *World Conference on Woman* yang diselenggarakan oleh PBB pada kuartal akhir abad ke-20 ini sangat berperan penting dalam membawa kesetaraan gender dalam agenda global. Konferensi-konferensi tersebut mempersatukan komunitas internasional yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kemajuan wanita di seluruh dunia (United Nations, 1995). Adanya *World Conference on Women* ini merupakan suatu peristiwa yang sangat berarti bagi sejarah *woman's rights*. Konferensi tersebut sangat membantu dalam pembentukan *Feminist Foreign Policy*, dimana melalui FFP ini perempuan mempunyai wadah untuk bersuara mengenai hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

2.3.2 Negara yang Mengadopsi *Feminist Foreign Policy*

Selain Meksiko, hingga saat ini terdapat negara yang turut serta mengadopsi *Feminist Foreign Policy* dan terus bertambah setiap tahunnya. Terdapat beberapa negara secara resmi telah mengadopsi FFP ini yaitu Swedia (2014), Kanada (2017), Prancis (2019), Meksiko (2020), Spanyol (2021), Luxemburg (2021), Jerman (2021), Chile (2022), dan terdapat beberapa negara lain yang saat ini masih dalam tahap proses mengembangkan perspektif feminis dalam kebijakan luar negeri mereka, yaitu seperti Belanda dan Belgia.

1. Swedia

Swedia mendeklarasikan suatu perubahan kebijakan dengan meluncurkan suatu kebijakan baru yaitu *Feminist Foreign Policy*. Melalui kebijakan luar negeri ini Swedia berusaha untuk berkontribusi pada perdamaian dan tatanan dunia yang lebih baik, dimana dengan mengatasi ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan kekerasan gender global.

Sebagai negara pertama yang mengadopsi kebijakan luar negeri feminis ini, pendekatan Swedia telah menetapkan dasar untuk memahami konsep dari kebijakan luar negeri feminis tersebut. Swedia sendiri menyatakan pada dasarnya kebijakan luar negeri feminis ini melibatkan komitmen terhadap kesetaraan gender sebagai tujuan utama dari kebijakan luar negeri, serta komitmen untuk menerapkan lensa gender di semua bidang pekerjaan dan operasi mereka. Kebijakan dari Swedia dijelaskan melalui “*The Three Rs*”, yang berisikan:

- ***Rights***: mempromosikan hak-hak wanita yang berhak mereka dapatkan dan nimati sepenuhnya, dan memerangi segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dapat membatasi tindakan mereka.
- ***Representation***: mempromosikan partisipasi dan pengaruh perempuan dalam pengambilan suatu keputusan di semua tingkatan dan semua bidang dalam kehidupan bermasyarakat.
- ***Resources***: memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dialokasikan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan dapat

memberikan kesempatan yang sama bagi semua perempuan dan anak perempuan untuk menikmati hak asasi manusia (IWDA, 2020).

2. Kanada

Pada Juni 2017, pemerintahan Kanada yang dipimpin oleh Justin Trudeau memperkenalkan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP). FIAP ini secara eksplisit mengambil pendekatan feminis terhadap kebijakan luar negeri Kanada dan pembangunan internasional untuk menargetkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Fokus Kanada terhadap perempuan dan anak perempuan dalam pemerintahan global dan sektor pembangunan internasional dapat dibilang sudah berlangsung cukup lama. Contohnya yaitu dengan keterlibatan Kanada dalam *United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang dilaksanakan pada tahun 1979, dan juga *Beijing Declaration and Platform for Action* yang disusun pada Konferensi PBB tentang perempuan tahun 1995, dan dua rencana aksi nasional tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan (Lamensch, 2020).

Kanada meyakini bahwa dengan adanya bantuan feminis internasional ini dapat berupaya memberantas kemiskinan dan membangun dunia lebih damai, lebih inklusif, dan lebih makmur. Pendekatan feminis Kanada untuk bantuan internasional ini bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dengan mengubah norma sosial dan hubungan kekuasaan. Untuk mencapai hal ini, kebijakan Kanada ini berkomitmen untuk bermitra dengan organisasi hak perempuan. Tujuan

Kanada mengadopsi *Feminist Foreign Policy* ini yaitu untuk membasmi kemiskinan dan membangun lingkungan yang lebih damai yaitu melalui kesetaraan gender dan juga pemberdayaan perempuan (IWDA, 2020).

3. Prancis

Prancis juga menjadi salah satu negara yang turut serta mengadopsi kebijakan luar negeri feminis ini. Pada 8 Maret 2019 yang merupakan peringatan Hari Perempuan Internasional, Prancis mengumumkan akan mengadopsi *Feminist Foreign Policy* menyusul Swedia dan Kanada. Prancis sendiri telah mengisyaratkan keinginannya untuk memberikan contoh kebijakan luar negeri feminis untuk diikuti oleh seluruh dunia (Pallapothu, 2020).

Pemerintahan Prancis memprioritaskan kesetaraan gender di negaranya. Prancis sendiri mengadvokasikan kesetaraan gender di forum internasional yaitu dengan tujuan mengurangi ketidaksetaraan, pembangunan berkelanjutan, perdamaian dan keamanan, pertahanan dan promosi hak-hak dasar. Sebelumnya, Prancis sudah mengembangkan pendekatan kebijakan mereka selama beberapa tahun yang berfokus terhadap isu gender, seperti kebijakan pembangunan internasional yang berfokus pada kesetaraan gender, diplomasi feminis, dan pada akhirnya turut serta mengadopsi *Feminist Foreign Policy* (IWDA, 2020).

4. Spanyol

Spanyol juga turut serta bergabung dengan negara-negara lain yang berkomitmen untuk menerapkan *Feminist Foreign Policy*. Keputusan pemerintahan Spanyol untuk bergerak menuju kebijakan luar negeri feminis yaitu untuk mencapai *United Nations Agenda 2030* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kebijakan luar negeri Spanyol akan berkontribusi untuk bergerak menuju kesetaraan yang nyata di tingkat internasional (GOBIERNO DE ESPAÑA, 2021). Untuk menggerakkan FFP di Spanyol, terdapat serangkaian instrument yang digunakan, seperti pengarusutamaan sensitivitas gender dalam kebijakan luar negeri, diplomasi bilateral dan regional, diplomasi multilateral dan public, kerja sama internasional untuk pembangunan berkelanjutan, perlindungan dan bantuan konsuler (Romero, 2021).

5. Luxembourg

Luxembourg juga menjadi negara yang menyatakan niatnya untuk menerapkan kebijakan luar negeri feminis, hal ini disampaikan melalui Perjanjian Koalisi pada akhir tahun 2018. Ketertarikan dari Luxembourg ini yaitu dengan tujuan untuk memusatkan promosi prioritas melalui dialog diplomatik yang berisikan representasi sosial dan politik perempuan, kesempatan setara yang didapatkan oleh perempuan dalam segala bidang (dalam pendidikan, pekerjaan, layanan sosial, kesehatan, dan hak atas tanah atau properti (Pallapothu, 2023).

6. Jerman

Jerman turut serta mengadopsi *Feminist Foreign Policy* pada satu Maret 2023, dimana Menteri Luar Negeri Jerman *Annalena Baerbock* meluncurkan pedoman Kebijakan Luar Negeri baru. Peluncuran dari pedoman tersebut dengan tujuan untuk upaya menjadikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan sebagai tujuan sentral dalam hubungan eksternal Jerman. Pedoman baru yang dikembangkan oleh pemerintah ini berisikan susunan kerangka kerja yang luas untuk menanamkan atau mengikutsertakan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender di berbagai bidang kebijakan luar negeri Jerman (Brechenmacher, 2023).

7. Chile

Chile juga menjadi salah satu negara di bagian Amerika Selatan selain Meksiko yang turut menyatakan ketertarikan mereka untuk menerapkan *Feminist Foreign Policy*. Pada Maret 2022, Menteri Luar Negeri Chili *Antonia Urrejola* mengumumkan bahwa Chile sedang mengembangkan FFP. Pemerintahan Chile mengeluarkan rencana *Feminist Foreign Policy*, yang mana hal ini merupakan upaya untuk menetapkan kesetaraan gender sebagai prinsip panduan di Kementrian Luar Negeri. Chile saat ini bercita-cita mengembangkan kebijakan dan tindakan yang mempromosikan otonomi dan pemberdayaan perempuan di berbagai ruang untuk membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Chile juga memperkuat komitmennya untuk mempromosikan hak asasi manusia yang telah dijunjung dalam beberapa dekade terakhir. Chile bergabung dengan negara-negara

lainnya yang telah mengadopsi *Feminist Foreign Policy* untuk memperkuat demokrasi dengan fokus terhadap kesetaraan gender, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan, dan menangani isu-isu gender. Pemerintahan Chile sendiri mengakui bahwa adanya kesenjangan gender dapat membuat hambatan bagi pembangunan demokrasi yang lebih representatif dan membatasi perkembangan negara (Merco Press, 2023).